

# BUPATI BOALEMO



PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 9 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2016  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja

|                  |  |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI |  |
| DINAS            |  |
| BADAN            |  |
| KANTOR           |  |
| BAGIAN           |  |

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sehingga menyebabkan terjadinya Perseseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan Dalam Satu Program, Antar Beberapa Program, dan Antar Jenis Belanja dan dalam rangka Pemanfaatan Silpa Dana Desa, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan pengeseran anggaran;

|                 |  |
|-----------------|--|
| PARAF HIRARKHIS |  |
| WRBUP           |  |
| SEKDA           |  |
| ASS III         |  |
| IRBANG KURNIA   |  |

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
  2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874 );
32. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 6 );
35. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 393);
36. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 609).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor :170/DPRD/58/II/2017 Tanggal 24 Februari 2017 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

**Pasal 1**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 609) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Semula   | Rp. 93.713.882.432,-        |
| Bertambah/berkurang  | <u>Rp. 627.418.000,-</u>    |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan | Rp. 94.341.300.432,-        |
| <b>b. Belanja Langsung</b>   |                             |
| 1) Belanja Pegawai   |                             |
| Semula   | Rp. 50.796.973.563,-        |
| Bertambah/berkurang  | <u>Rp. 269.800.000,-</u>    |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan   | Rp. 51.066.773.563,-        |
| 2) Belanja Barang dan Jasa   |                             |
| Semula   | Rp. 137.281.813.052,-       |
| Bertambah/berkurang  | <u>Rp. 1.780.031.700,-</u>  |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan   | Rp. 139.061.844.752,-       |
| 3) Belanja Modal   |                             |
| Semula   | Rp.180.962.401.350,-        |
| Bertambah/berkurang  | <u>Rp. 10.413.798.613,-</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan   | Rp.191.376.199.963,-        |
| <b>c. Pembiayaan</b>   |                             |
| 1) Penerimaan  |                             |
| Semula   | Rp. 571.500.000,-           |
| Bertambah/berkurang  | <u>Rp. 13.091.048.313,-</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  | Rp. 13.662.548.313,-        |

2. Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan.

3. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Satu Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut;

**Pasal 6 A**

Pergesaran Anggaran yang dimaksud dalam Pasal 1 akan ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 27 FEBRUARI 2017

 **Pj. BUPATI BOALEMO,**

  
**YUSUF GIASI**

Di undangkan di Tilamuta

Pada tanggal 27 FEBRUARI 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**



**HUSAIN A. ETANGO**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650725 198801 1 002

( BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR .....<sup>618</sup> )



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

| NOMOR URUT | URAIAN  | JUMLAH (Rp)        |                    | BERTAMBAH / (BERKURANG) |          |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|
|            |   | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp)                    | %        |
| 1          | 2   | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3               | 6        |
| 1          | <b>PENDAPATAN</b>   | 789.842.218.875,00 | 789.842.218.875,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>   | 35.801.410.875,00  | 35.801.410.875,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah   | 4.885.018.000,00   | 4.885.018.000,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.2      | Hasil Retribusi Daerah  | 2.344.169.000,00   | 2.344.169.000,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                             | 5.000.000.000,00   | 5.000.000.000,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                     | 23.572.223.875,00  | 23.572.223.875,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 1.2        | <b>DANA PERIMBANGAN</b>   | 663.447.410.000,00 | 663.447.410.000,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 1.2.4      | Dana Transfer Umum  | 472.604.092.000,00 | 472.604.092.000,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 1.2.5      | Dana Transfer Khusus  | 190.843.318.000,00 | 190.843.318.000,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 1.3        | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                   | 90.593.398.000,00  | 90.593.398.000,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah  | 1.737.200.000,00   | 1.737.200.000,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 1.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya             | 15.000.000.000,00  | 15.000.000.000,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 1.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus   | 73.688.198.000,00  | 73.688.198.000,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 1.3.5      | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya                 | 168.000.000,00     | 168.000.000,00     | 0,00                    | 0,00     |
| 2          | <b>BELANJA</b>  | 776.913.718.875,00 | 790.004.767.188,00 | 13.091.048.313,00       | 1,69     |
| 2.1        | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>   | 407.872.530.910,00 | 408.499.948.910,00 | 627.418.000,00          | 0,15     |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai   | 295.912.407.978,00 | 295.912.407.978,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 2.1.2      | Belanja Bunga   | 5.000.000.000,00   | 5.000.000.000,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 2.1.4      | Belanja Hibah   | 12.246.240.500,00  | 12.246.240.500,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 93.713.882.432,00  | 94.341.300.432,00  | 627.418.000,00          | 0,67     |
| 2.1.8      | Belanja Tidak Terduga   | 1.000.000.000,00   | 1.000.000.000,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 2.2        | <b>BELANJA LANGSUNG</b>   | 369.041.187.965,00 | 381.504.818.278,00 | 12.463.630.313,00       | 3,38     |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai   | 50.796.973.563,00  | 51.066.773.563,00  | 269.800.000,00          | 0,53     |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa   | 137.281.813.052,00 | 139.061.844.752,00 | 1.780.031.700,00        | 1,30     |
| 2.2.3      | Belanja Modal   | 180.962.401.350,00 | 191.376.199.963,00 | 10.413.798.613,00       | 5,75     |
|            | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>  | 12.928.500.000,00  | (162.548.313,00)   | (13.091.048.313,00)     | (101,26) |

| NOMOR URUT | URAIAN  | JUMLAH (Rp)         |                    | BERTAMBAH / (BERKURANG) |          |
|------------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|
|            |   | SEBELUM PERGESERAN  | SETELAH PERGESERAN | (Rp)                    | %        |
| 1          | 2   | 3                   | 4                  | 5 = 4 - 3               | 6        |
| 3          | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                  |                     |                    |                         |          |
| 3.1        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                       | 571.500.000,00      | 13.662.548.313,00  | 13.091.048.313,00       | 2.290,65 |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 571.500.000,00      | 13.662.548.313,00  | 13.091.048.313,00       | 2.290,65 |
| 3.2        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                      | 13.500.000.000,00   | 13.500.000.000,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 3.2.3      | Pembayaran Pokok Utang                                    | 13.500.000.000,00   | 13.500.000.000,00  | 0,00                    | 0,00     |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                   | (12.928.500.000,00) | 162.548.313,00     | 13.091.048.313,00       | (101,26) |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00     |

Tilamuta, 27 February 2017  
Pj. Bupati Boalemo

Ir. YUSUF GIASI, M.Sc



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

| NOMOR URUT | URAIAN  | JUMLAH (Rp)          |                     | BERTAMBAH / (BERKURANG) |          |
|------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|            |   | SEBELUM PERUBAHAN    | SETELAH PERUBAHAN   | (Rp)                    | %        |
| 1          | 2   | 3                    | 4                   | 5                       | 6        |
| 1          | <b>PENDAPATAN</b>   | 789.842.218.875,00   | 789.842.218.875,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>   | 35.801.410.875,00    | 35.801.410.875,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah   | 4.885.018.000,00     | 4.885.018.000,00    | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.2      | Hasil Retribusi Daerah  | 2.344.169.000,00     | 2.344.169.000,00    | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                             | 5.000.000.000,00     | 5.000.000.000,00    | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                     | 23.572.223.875,00    | 23.572.223.875,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 1.2        | <b>DANA PERIMBANGAN</b>   | 663.447.410.000,00   | 663.447.410.000,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 1.2.4      | Dana Transfer Umum  | 472.604.092.000,00   | 472.604.092.000,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 1.2.5      | Dana Transfer Khusus  | 190.843.318.000,00   | 190.843.318.000,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 1.3        | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                   | 90.593.398.000,00    | 90.593.398.000,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah  | 1.737.200.000,00     | 1.737.200.000,00    | 0,00                    | 0,00     |
| 1.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya             | 15.000.000.000,00    | 15.000.000.000,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 1.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus   | 73.688.198.000,00    | 73.688.198.000,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 1.3.5      | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya                 | 168.000.000,00       | 168.000.000,00      | 0,00                    | 0,00     |
| 2          | <b>BELANJA</b>  | 776.913.718.875,00   | 790.053.832.188,00  | 13.140.113.313,00       | 1,69     |
| 2.1        | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>   | 407.872.530.910,00   | 408.499.948.910,00  | 627.418.000,00          | 0,15     |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai   | 295.912.407.978,00   | 295.912.407.978,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 2.1.2      | Belanja Bunga   | 5.000.000.000,00     | 5.000.000.000,00    | 0,00                    | 0,00     |
| 2.1.4      | Belanja Hibah   | 12.246.240.500,00    | 12.246.240.500,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 93.713.882.432,00 ✓  | 94.341.300.432,00 ✓ | 627.418.000,00 ✓        | 0,67     |
| 2.1.8      | Belanja Tidak Terduga   | 1.000.000.000,00     | 1.000.000.000,00    | 0,00                    | 0,00     |
| 2.2        | <b>BELANJA LANGSUNG</b>   | 369.041.187.965,00   | 381.553.883.278,00  | 12.512.695.313,00       | 3,39     |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai   | 50.796.973.563,00 ✓  | 51.066.773.563,00 ✓ | 269.800.000,00 ✓        | 0,53     |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa   | 137.281.813.052,00 ✓ | 139.061.844.752,00  | 1.780.031.700,00 ✓      | 1,30     |
| 2.2.3      | Belanja Modal   | 180.962.401.350,00   | 191.425.264.963,00  | 10.462.863.613,00       | 5,78     |
|            | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>  | 12.928.500.000,00    | (211.613.313,00)    | (13.140.113.313,00)     | (101,64) |

| NOMOR URUT | URAIAN  | JUMLAH (Rp)         |                   | BERTAMBAH / (BERKURANG) |          |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|
|            |   | SEBELUM PERUBAHAN   | SETELAH PERUBAHAN | (Rp)                    | %        |
| 1          | 2   | 3                   | 4                 | 5                       | 6        |
| 3          | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                  |                     |                   |                         |          |
| 3.1        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                       | 571.500.000,00      | 13.711.613.313,00 | 13.140.113.313,00       | 2.299,23 |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 571.500.000,00      | 13.711.613.313,00 | 13.140.113.313,00       | 2.299,23 |
| 3.2        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                      | 13.500.000.000,00   | 13.500.000.000,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 3.2.3      | Pembayaran Pokok Utang                                    | 13.500.000.000,00   | 13.500.000.000,00 | 0,00                    | 0,00     |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                   | (12.928.500.000,00) | 211.613.313,00    | 13.140.113.313,00       | (101,64) |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>     | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00     |

Tilamuta, 22 February 2017

Pj. Bupati Boalemo

  
Ir. YUSUF GIASI, M.Sc